

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memprioritaskan sektor pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pendapatan sektor pariwisata dalam PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta. Sektor pariwisata memiliki dampak positif terhadap di D.I. Yogyakarta, namun di sisi lain kondisi ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pariwisata terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, maka untuk lebih memahami pengaruh dari pertumbuhan pariwisata tersebut, sangat penting untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pariwisata terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, terutama pariwisata di wilayah yang pertumbuhan pariwisatanya terus mengalami peningkatan yang signifikan seperti di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan lima Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2009 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor di Provinsi D.I. Yogyakarta berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Ketimpangan ini terjadi akibat dengan adanya perbedaan karakteristik geografis, perbedaan sektor prioritas antar Kota/Kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta, dan ketimpangan infrastruktur pariwisata yang menyebabkan *capital intensive* dari satu daerah dengan daerah lainnya.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya daerah dengan tingkat IPM yang tinggi dan berbanding terbalik, dengan daerah lain dengan tingkat IPM yang rendah. Hal ini dibuktikan oleh IPM di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman jauh lebih tinggi dibandingkan tiga daerah lainnya. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sudah memasuki sektor modern dan jasa dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, salah satunya sektor pariwisata, sedangkan tiga daerah lain masih memprioritaskan sektor pertanian yang tidak terlalu membutuhkan *skilled labor* atau kualitas sumber daya manusia yang baik. Variabel terakhir adalah laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh aktifitas ekonomi yang terpusat di dua wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur pariwisata,

salah satunya bandar udara yang dapat membantu wisatawan untuk mengakses suatu daerah. Selain itu tingginya investasi dalam bentuk pembangunan hotel, guna merespon tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Besarnya investasi pada sektor pariwisata di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyebabkan ketimpangan dengan daerah lain. Sehingga kegiatan ekonomi dan kegiatan wisatawan akan terlebih dahulu dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dibandingkan daerah lain di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Ketimpangan kerap kali dinilai sebuah kegagalan dalam pembangunan suatu daerah. Akan tetapi, ketimpangan pada taraf tertentu adalah normal. Ketimpangan menunjukkan bahwa masyarakat dengan produktifitas lebih tinggi akan memiliki insentif lebih besar dibandingkan masyarakat dengan produktifitas rendah. Ketimpangan akan mendorong masyarakat meningkatkan produktifitas agar mendapatkan insentif yang lebih besar. Akan tetapi ketimpangan yang terlalu besar merupakan suatu kesalahan dalam perekonomian, karena tidak adil jika semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka dari itu penulis ingin memberikan saran untuk melanjutkan penelitian ini:

1. Membuktikan hipotesis kuznet, apakah sektor pariwisata pada waktu tertentu akan berpengaruh pada penurunan di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pariwisata terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

5.2. Implikasi Kebijakan

Sektor pariwisata di suatu daerah membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi akibat aktivitas pariwisata di suatu daerah, akan menyebabkan ketimpangan pendapatan di daerah lain di wilayah tersebut. Tingginya aktivitas pariwisata di suatu daerah bisa dilihat melalui pendapatan PDRB sektor pariwisata di daerah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan antara kota/kabupaten di suatu provinsi. Kualitas sumber daya manusia kerap kali menjadi salah satu faktor tersebut. Guna memanfaatkan kualitas sumber daya yang ada untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah yang tidak memiliki aktivitas pariwisata yang tinggi, contohnya wilayah pedesaan, pemerintah dan kementerian pariwisata sudah mulai menggerakkan program desa wisata bersama desa-desa yang tersebar di Indonesia. Salah satu contohnya desa wisata yang ada di

Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, yang menjadi sangat potensial untuk mendatangkan wisatawan dan meningkatkan perekonomian sekitar. Diharapkan dengan membangun desa wisata pada akhirnya dapat memanfaatkan sumber daya lokal. Sehingga desa-desa yang terbangun dapat menjadi kutub pengaman Provinsi D.I. Yogyakarta dari ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I., & Morris, C. T. (1972). Who benefits from economic development ? *International Meeting of Directors of Development Research* (pp. 2-36). Belgrade: Development Research Center.
- Alam, M. S., & Paramati, S. R. (2016). The impact of tourism on income inequality in developing economies: Does kuznets curve hypothesis exist? *Annals of Tourism Research*, 61, 111-126.
- Apriliani, N. S., & Bandesa, I. (2013). Analisis disparitas pendapatan di kawasan pariwisata Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan UNUD*, 2(4).
- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *DIY dalam angka 2009*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *DIY dalam angka 2010*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *DIY dalam angka 2011*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *DIY dalam angka 2012*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *DIY dalam angka 2013*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *DIY dalam angka 2014*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *DIY dalam angka 2015*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *DIY dalam angka 2016*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistik. (2017). *DIY dalam angka 2017*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *DIY dalam angka 2018*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Damanik, J., & Weber, H. (2006). *Perencanaan ekowisata : Teori ke aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2009). *Statistik kepariwisataan 2009*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2010). *Statistik kepariwisataan 2010*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2011). *Statistik kepariwisataan 2011*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2012). *Statistik kepariwisataan 2012*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2013). *Statistik kepariwisataan 2013*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). *Statistik kepariwisataan 2014*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Statistik kepariwisataan 2015*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). *Statistik kepariwisataan 2016*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Statistik kepariwisataan 2017*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Statistik kepariwisataan 2018*. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Elizabeth. (2007). *The human development index: A history*. Global Development and Environment Institute Tufts University.

- Erl. (2019). *kumparan.com*. Retrieved from Sektor pariwisata duduki peringkat ke-2 penyumbang PDRB di Provinsi Yogyakarta: <https://kumparan.com/tugujogja/dari-17-sektor-usaha-penyumbang-pdrb-di-yogyakarta-pariwisata-menduduki-peringkat-kedua>
- Garson, G. D. (2012). *GLM multivariate, MANOVA, and canonical correlation*. Carolina State: Statistical Associates Publishing.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011-2015. *Journal UNY*, 530-539.
- Iskandar, A. (2014). Analisis kualitas pertumbuhan ekonomi ditinjau dari pendekatan middle income trap. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 126-140.
- Jhingan, M. L. (2010). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Pariwisata. (2019, 11 29). *Pacu wisata perdesaan dan perkotaan DIY, Kemenpar bikin bimtek di Yogyakarta*. Retrieved from bob.kemenpar.go.id: <http://bob.kemenpar.go.id/1698-pacu-wisata-perdesaan-dan-perkotaan-diy-kemenpar-bikin-bimtek-di-yogyakarta/>
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marpaung, H. (2002). *Pengetahuan Pariwisata*. Bandung: Alfa Beta.
- Mopangga, H. (2011, June). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomik*, 10(1), 40-51.
- Nuryanto, D. T. (2017). Pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan distribusi pendapatan di Bali. *Jurnal, Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 2, 43-54.
- Putri, Y. E. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. 2(1).
- Ray, D. (1998). *Development Economics*. Princeton: NJ: Princeton Univesity Pers.
- Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 3(2), 146-170.

- Scheyvens, R. (2002). Backpacker tourism and third world development. (A. o. Research, Ed.) 29(1), 144-164.
- Solihin, A. I. (1995). *Investasi modal manusia melalui pendidikan: Pentingnya peran pemerintah*. Jakarta: Jakarta Mini Economica.
- Spillane, J. J. (1987). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: Kanisius.
- Sutarno. (2003). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000. *Economic Journal of Emerging Market*, 2(1), 97-110.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic developmet*. Pearson: Pearson Press.
- UNWTO. (2017, June 17). (The United Nations World Tourism Organization) Retrieved October 2, 2019, from <http://www2.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2017>.
- World Tourism Organization . (1999). *Tourism: 2020 Vision executive summary updated*. Madrid, Spain: United Nation World Tourism Organization.